



Komunikasi Krisis dan Kontestasi Data dalam Isu Dugaan Pencemaran Lingkungan PT IWIP di Halmahera Tengah

M. Zulfikar Ismail¹, Sukendi², Tria Patrianti³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email : m.zulfikar@student.umj.ac.id¹, sukendi.s@student.umj.ac.id²,
tria.patrianti@umj.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis komunikasi krisis PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dalam isu dugaan pencemaran lingkungan, krisis air bersih, ISPA, konflik lahan, dan menurunnya kepercayaan publik di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kasus ini penting dikaji karena krisis yang muncul tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis lingkungan, tetapi juga menyangkut reputasi organisasi, legitimasi industri nikel, dan relasi antara perusahaan, pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui media monitoring terhadap korpus pemberitaan online periode 2022–2026, dokumen resmi perusahaan, laporan organisasi masyarakat sipil, artikel ilmiah, serta wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Tengah. Analisis dilakukan menggunakan Situational Crisis Communication Theory, Image Repair Theory, Crisis and Emergency Risk Communication, Framing Theory, Social Amplification of Risk Framework, Stakeholder Salience Theory, dan Legitimacy Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis IWIP berkembang sebagai krisis reputasi ekologis yang ditandai oleh pertarungan narasi antara pemberitaan media, laporan NGO, klarifikasi pemerintah daerah, dan respons perusahaan melalui bantahan, CSR, ESG, serta program lingkungan. Strategi komunikasi IWIP cenderung menggunakan pola denial, diminish, bolstering, dan corrective action. Efektivitas komunikasi tersebut masih menghadapi tantangan karena terdapat kesenjangan antara data teknis, persepsi risiko warga, dan kepercayaan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi krisis dalam industri ekstraktif memerlukan transparansi data, dialog partisipatif, empati terhadap warga terdampak, audit independen, serta media monitoring berkelanjutan.

Kata kunci: komunikasi krisis, komunikasi risiko, IWIP, Sungai Sagea, reputasi organisasi, ESG, media monitoring.

Abstract

This study analyzes the crisis communication of PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) in relation to alleged environmental pollution, clean water crisis, acute respiratory infections, land conflicts, and declining public trust in Central Halmahera, North Maluku. This case is important because the crisis is not merely a technical environmental issue but also concerns organizational reputation, legitimacy of the nickel industry, and relations among corporations, government, media, civil society organizations, and affected communities. This research uses a qualitative case study approach. Data were collected through media monitoring of online news coverage from 2022 to 2026, corporate documents, civil society reports, scientific articles, and an interview with the Environmental Agency of Central Halmahera. The analysis applies Situational Crisis Communication Theory, Image Repair Theory, Crisis and Emergency Risk Communication, Framing Theory, Social Amplification of Risk Framework, Stakeholder Salience Theory, and Legitimacy Theory. The findings indicate that IWIP's crisis has developed into an ecological reputation crisis marked by contested narratives among

media reports, NGO findings, government clarification, and corporate responses through denial, CSR, ESG narratives, and environmental programs. IWIP's communication strategies tend to involve denial, diminish, bolstering, and corrective action. Their effectiveness remains challenged by gaps between technical data, community risk perception, and public trust. This study argues that crisis communication in extractive industries requires data transparency, participatory dialogue, empathy toward affected communities, independent audits, and continuous media monitoring.

Keywords: crisis communication, risk communication, IWIP, Sagea River, organizational reputation, ESG, media monitoring.

PENDAHULUAN

Hilirisasi nikel menjadi salah satu agenda strategis pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah mineral, memperkuat industrialisasi, membuka lapangan kerja, serta menempatkan Indonesia dalam rantai pasok global industri baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat. Salah satu kawasan industri nikel yang menonjol dalam agenda tersebut adalah Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang berlokasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kehadiran IWIP membawa narasi pembangunan, investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan peluang kerja. Pada saat yang sama, aktivitas industri nikel di Halmahera Tengah juga memunculkan berbagai persoalan sosial-ekologis. Beberapa isu yang muncul dalam pemberitaan dan laporan masyarakat sipil meliputi perubahan kualitas air, krisis air bersih, konflik lahan, debu, peningkatan ISPA, perubahan ruang hidup masyarakat, serta resistensi warga terhadap perluasan kawasan industri. Laporan AEER mencatat bahwa kegiatan pertambangan nikel memiliki dampak negatif terhadap aspek sosial dan lingkungan, termasuk konflik kepentingan atas lahan dan sumber daya, perubahan mata pencaharian, pencemaran air dan udara, berkurangnya tutupan hutan, serta potensi ancaman terhadap kesehatan manusia. Laporan tersebut juga menyebut bahwa kawasan IWIP berdampak pada desa-desa sekitar seperti Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen, Gemaf, dan Sagea (Saputra et al., 2023).

Kajian GEOMining mengenai kualitas air di kawasan lingkaran tambang Halmahera Tengah menunjukkan bahwa penelitian kualitas lingkungan perlu dilakukan untuk membandingkan rona lingkungan awal sebelum industri pertambangan beroperasi dengan kondisi setelah operasi pertambangan dan industri pengolahan berjalan. Studi tersebut melakukan pengambilan data primer kualitas air melalui pengamatan lapangan dan analisis laboratorium dengan parameter seperti pH, TSS, Cu, Cd, Zn, Pb, Ni, Cr, Fe, dan Co (Haya et al., 2022). Krisis yang melibatkan IWIP penting dikaji dalam perspektif komunikasi krisis karena organisasi tidak hanya menghadapi tuduhan kerusakan lingkungan, tetapi juga tekanan

reputasi. Dalam konteks industri ekstraktif, reputasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi menjelaskan risiko, merespons keluhan warga, membuka data lingkungan, serta menunjukkan tanggung jawab sosial secara kredibel. Ketika perusahaan, pemerintah, media, NGO, dan masyarakat memiliki narasi berbeda terhadap satu isu, krisis tidak hanya berlangsung pada level teknis, tetapi juga pada level kepercayaan publik.

Penelitian ini memosisikan kasus IWIP sebagai krisis sosial-ekologis sekaligus krisis komunikasi. Fokus penelitian bukan untuk membuktikan secara hukum penyebab pencemaran, melainkan untuk menganalisis bagaimana krisis tersebut dikonstruksi melalui pemberitaan media, bagaimana organisasi merespons, bagaimana pemerintah daerah memberikan klarifikasi, serta bagaimana perbedaan data dan narasi memengaruhi reputasi organisasi dan kepercayaan publik.

LANDASA TEORI

Komunikasi Krisis dan Situational Crisis Communication Theory

Komunikasi krisis merupakan proses strategis yang dilakukan organisasi ketika menghadapi peristiwa yang mengancam reputasi, legitimasi, operasional, dan kepercayaan publik. Krisis tidak hanya dipahami sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian material, tetapi juga sebagai situasi yang memunculkan persepsi negatif publik terhadap tanggung jawab organisasi. Penelitian ini menggunakan Situational Crisis Communication Theory atau SCCT sebagai teori utama. SCCT menjelaskan bahwa strategi komunikasi krisis harus disesuaikan dengan tingkat atribusi tanggung jawab publik terhadap organisasi. Semakin besar publik menilai organisasi bertanggung jawab atas krisis, semakin kuat pula kebutuhan organisasi untuk menggunakan strategi pemulihan, seperti tindakan korektif, kompensasi, dan permintaan maaf. Coombs (2007) menegaskan bahwa SCCT membantu manajer krisis memprediksi reaksi stakeholder terhadap krisis dan memilih strategi respons untuk melindungi reputasi organisasi. Dalam penelitian ini, SCCT digunakan untuk membaca strategi komunikasi PT IWIP dalam isu dugaan pencemaran Sungai Sagea, krisis air bersih, ISPA, konflik lahan, dan tekanan reputasi. Strategi yang dianalisis meliputi denial, diminish, bolstering, corrective action, serta silence/no direct response.

Image Repair Theory

Penelitian ini juga menggunakan Image Repair Theory untuk memahami bagaimana organisasi memperbaiki citra ketika menghadapi tuduhan publik. Benoit (1997) menjelaskan

bahwa teori image repair dapat digunakan untuk menganalisis pesan organisasi dalam situasi krisis, terutama ketika organisasi dituduh melakukan kesalahan atau kelalaian.

Dalam konteks IWIP, Image Repair Theory relevan untuk menganalisis bentuk-bentuk respons perusahaan seperti bantahan terhadap tuduhan pencemaran, penjelasan faktor alam atau teknis, publikasi CSR/ESG, serta program yang diklaim sebagai tindakan pemulihan. Strategi image repair yang dapat digunakan dalam analisis meliputi denial, evading responsibility, reducing offensiveness, corrective action, dan mortification. Berdasarkan korpus media monitoring, strategi mortification atau permintaan maaf eksplisit belum tampak dominan dalam respons IWIP.

Komunikasi Risiko dan Crisis and Emergency Risk Communication

Isu IWIP tidak hanya merupakan krisis reputasi, tetapi juga krisis risiko lingkungan dan kesehatan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi risiko dan Crisis and Emergency Risk Communication atau CERC. Reynolds dan Seeger (2005) menjelaskan CERC sebagai model integratif yang menggabungkan komunikasi risiko, komunikasi kesehatan, dan komunikasi krisis untuk menjawab kebutuhan informasi publik dalam berbagai fase krisis.

Pendekatan CERC penting karena isu Sungai Sagea, dugaan pencemaran, kandungan logam berat, ikan, air bersih, dan ISPA membutuhkan komunikasi yang cepat, akurat, transparan, empatik, dan mudah dipahami. Dalam wawancara dengan DLH Halmahera Tengah, perbedaan antara temuan Nexus3 dan data DLH dijelaskan sebagai persoalan metodologi, parameter pengujian, standar baku mutu, waktu pengambilan sampel, serta objek penelitian. Dengan demikian, komunikasi risiko dalam kasus IWIP tidak cukup hanya menyampaikan data teknis, tetapi juga harus menjawab kecemasan warga.

Framing Media dan Media Monitoring

Penelitian ini menggunakan Framing Theory untuk menganalisis pemberitaan media. Entman (1993) menjelaskan bahwa framing merupakan proses memilih aspek tertentu dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi. Framing dapat membentuk cara publik memahami masalah, penyebab, aktor yang bertanggung jawab, dan solusi yang dianggap tepat.

Dalam penelitian ini, framing digunakan untuk membaca bagaimana media membingkai IWIP dalam beberapa isu: pencemaran Sungai Sagea, krisis air bersih, ISPA,

konflik lahan, ruang hidup warga, CSR, ESG, dan klarifikasi pemerintah. Framing media dalam kasus IWIP memperlihatkan adanya perbedaan narasi. Media lingkungan dan media lokal cenderung membingkai IWIP melalui isu risiko sosial-ekologis, sedangkan kanal korporasi, advertorial, dan dokumen ESG cenderung membingkai IWIP sebagai aktor pembangunan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

Social Amplification of Risk Framework

Penelitian ini menggunakan Social Amplification of Risk Framework atau SARF untuk menjelaskan mengapa isu teknis lingkungan dapat berkembang menjadi krisis reputasi dan krisis kepercayaan publik. Kasperson et al. (1988) menjelaskan bahwa risiko tidak hanya dipahami melalui penilaian teknis, tetapi juga melalui proses sosial, psikologis, budaya, institusional, dan komunikasi publik. Risiko dapat mengalami amplifikasi ketika media, NGO, warga, atau institusi tertentu memperkuat perhatian publik terhadap suatu isu. Dalam kasus IWIP, isu dugaan pencemaran tidak hanya berkembang karena adanya perdebatan data kualitas air atau kandungan logam berat, tetapi juga karena pengalaman warga, pemberitaan media, laporan NGO, klarifikasi pemerintah, serta respons perusahaan. Laporan Nexus3 menyajikan temuan tentang kualitas air, ikan, dan biomonitoring manusia, termasuk rekomendasi agar data lingkungan dan kesehatan diungkap secara transparan kepada publik (Nexus3 Foundation, 2025). SARF membantu menjelaskan mengapa hasil uji teknis atau bantahan organisasi tidak selalu cukup untuk meredam krisis.

Stakeholder Salience Theory

Krisis IWIP melibatkan banyak aktor, seperti perusahaan, warga terdampak, pemerintah daerah, DLH, media, NGO, investor, akademisi, dan tenaga kesehatan. Karena itu, penelitian ini menggunakan Stakeholder Salience Theory. Mitchell et al. (1997) menjelaskan bahwa posisi stakeholder dapat dibaca melalui tiga atribut utama, yaitu power, legitimacy, dan urgency.

Dalam kasus IWIP, warga terdampak memiliki legitimasi dan urgensi tinggi karena mereka mengalami langsung dampak risiko lingkungan dan sosial. Pemerintah daerah dan DLH memiliki power serta legitimasi karena berwenang melakukan pengawasan dan klarifikasi. IWIP memiliki power ekonomi dan institusional karena menjadi aktor industri utama. NGO memiliki legitimasi advokatif dan urgensi karena mengangkat isu lingkungan, kesehatan, dan hak warga. Media memiliki peran penting karena membentuk persepsi publik melalui framing pemberitaan.

Legitimacy Theory dan Komunikasi ESG

Penelitian ini juga menggunakan Legitimacy Theory untuk menganalisis CSR dan ESG IWIP. Suchman (1995) menjelaskan legitimasi sebagai persepsi bahwa tindakan organisasi dianggap sesuai dengan sistem norma, nilai, keyakinan, dan harapan sosial. Deegan (2002) menambahkan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan dapat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi organisasi. Dalam konteks IWIP, laporan ESG, program CSR, konservasi mangrove, pembangunan fasilitas sosial, dan penyediaan air bersih dapat dibaca sebagai strategi legitimasi organisasi. IWIP dalam ESG Report 2024 menyatakan bahwa laporan ESG disusun untuk mengungkap prinsip, metode manajemen, serta topik material lingkungan, sosial, dan tata kelola kepada stakeholder. Laporan tersebut juga memuat bagian stakeholder communication, environmental management, water resource management, local community development, serta communication and grievance (Indonesia Weda Bay Industrial Park, 2024).

Dalam perspektif legitimasi, CSR dan ESG tidak otomatis memulihkan reputasi apabila tidak menjawab isu utama yang dipersepsikan publik. Apabila warga dan media masih menyoroti air bersih, debu, ISPA, konflik lahan, dan ruang hidup, maka komunikasi ESG perlu dikaitkan langsung dengan keluhan warga, data lingkungan yang terbuka, serta tindakan korektif yang dapat diverifikasi.

Media Monitoring, Big Data, dan Artificial Intelligence

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan media monitoring untuk membaca pola isu, aktor, framing, nada pemberitaan, dan respons organisasi. Dalam konteks digital, media monitoring dapat diperkuat melalui pendekatan big data dan artificial intelligence. Stieglitz et al. (2018) menjelaskan bahwa analisis media sosial dan media digital mencakup proses penemuan topik, pengumpulan data, persiapan data, dan analisis. Imran et al. (2015) juga menunjukkan bahwa pesan media sosial dalam situasi krisis dapat diproses melalui tahap filtering, classifying, ranking, aggregating, extracting, dan summarizing.

Dalam konteks Indonesia, Solihin (2021) menjelaskan bahwa big data pada media sosial dapat digunakan sebagai strategi komunikasi krisis pemerintah, terutama untuk membaca percakapan publik dan menyusun respons komunikasi yang lebih adaptif. Dalam penelitian ini, pendekatan media monitoring digunakan untuk mengklasifikasikan berita berdasarkan media, tanggal, isu utama, aktor, framing, nada berita, respons IWIP, dan kategori SCCT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Kasus yang dikaji adalah komunikasi krisis PT IWIP dalam isu dugaan pencemaran lingkungan, krisis air bersih, ISPA, konflik lahan, dan kepercayaan publik di Halmahera Tengah. Data penelitian terdiri atas lima jenis. Pertama, korpus pemberitaan online yang memuat berita nasional, lokal, dan media digital mengenai IWIP, Sungai Sagea, pencemaran, krisis air bersih, ISPA, konflik lahan, CSR, dan ESG. Kedua, data respons organisasi, seperti pemberitaan tentang bantahan IWIP, CSR, ESG, penanaman mangrove, dan program air bersih. Ketiga, laporan NGO dan advokasi sebagai data tekanan publik. Keempat, dokumen resmi perusahaan seperti laporan ESG IWIP. Kelima, hasil wawancara dengan DLH Halmahera Tengah sebagai data pembandingan pemerintah daerah.

Analisis data dilakukan menggunakan kombinasi analisis framing media, coding media monitoring, dan kategorisasi strategi komunikasi krisis berdasarkan SCCT. Setiap berita dikodekan berdasarkan media, tanggal, isu utama, aktor utama, framing, nada berita, respons IWIP, dan kategori strategi komunikasi krisis. Kategori SCCT yang digunakan meliputi denial, diminish, bolstering, corrective action, dan silence/no direct response (Coombs, 2007). Analisis framing digunakan untuk membaca bagaimana media menonjolkan aspek tertentu dari realitas krisis, seperti pencemaran, kesehatan publik, konflik lahan, CSR, ESG, dan kontestasi data (Entman, 1993). Pendekatan komunikasi risiko digunakan untuk menilai apakah respons organisasi dan pemerintah telah memenuhi prinsip transparansi, akurasi, empati, dan keterbukaan informasi publik (Reynolds & Seeger, 2005)

penelitian ini dirumuskan dari hubungan antara krisis sosial-ekologis, framing media, respons organisasi, kontestasi data, dan reputasi publik. Isu sosial-ekologis IWIP muncul melalui dugaan pencemaran Sungai Sagea, krisis air bersih, ISPA, konflik lahan, dan ruang hidup warga. Isu tersebut diberitakan oleh media, diperkuat oleh laporan NGO, diklarifikasi oleh pemerintah daerah, serta dijawab oleh perusahaan melalui bantahan, CSR, ESG, dan program lingkungan.

Secara teoritis, SCCT digunakan untuk menganalisis strategi komunikasi krisis IWIP. CERC digunakan untuk membaca komunikasi risiko lingkungan dan kesehatan. Framing Theory digunakan untuk membaca konstruksi pemberitaan media. SARF digunakan untuk menjelaskan amplifikasi risiko. Stakeholder Salience Theory digunakan untuk memetakan

aktor. Legitimacy Theory digunakan untuk membaca CSR dan ESG sebagai strategi pemulihan legitimasi organisasi.

Isu sosial-ekologis IWIP: pencemaran, air bersih, ISPA, konflik lahan, ruang hidup
Pemberitaan media dan laporan NGO: framing negatif, kritik publik, tekanan reputasi
Respons IWIP dan pemerintah: denial, diminish, bolstering, corrective action, klarifikasi teknis
Kontestasi data: Nexus3, DLH, ESG, media, warga
Dampak komunikasi: reputasi organisasi dan kepercayaan publik

PEMBAHASAN

Dinamika Krisis Sosial-Ekologis IWIP dalam Pemberitaan Media

Pemberitaan mengenai IWIP menunjukkan bahwa krisis berkembang secara bertahap. Pada fase awal, isu yang muncul berkaitan dengan perubahan kualitas sungai, konflik lahan, dan perubahan ruang hidup warga. Laporan JATAM menyebut bahwa operasi pertambangan dan pengolahan nikel di Halmahera Tengah berdampak pada warga dan lingkungan, mulai dari lenyapnya ruang produksi pangan dan air, deforestasi, susutnya biodiversitas, pencemaran air, udara, laut, hingga konflik sosial (Jaringan Advokasi Tambang, 2024). Fase berikutnya ditandai oleh meningkatnya perhatian terhadap Sungai Sagea. Berita mengenai dugaan pencemaran Sungai Sagea dan ketakutan warga mengonsumsi air menjadi salah satu titik penting dalam kronologi krisis air bersih. Korpus berita juga mencatat isu ISPA di lingkaran tambang, konflik lahan, dugaan pencemaran yang kembali muncul, serta resistensi warga terhadap sosialisasi AMDAL perluasan tambang.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa krisis IWIP bukan krisis tunggal, melainkan krisis berlapis. Isu sungai, udara, kesehatan, lahan, ruang hidup, dan kepercayaan publik saling terhubung. Dalam perspektif komunikasi krisis, situasi ini membuat perusahaan menghadapi tekanan reputasi yang kompleks karena setiap isu baru memperkuat ingatan publik terhadap isu sebelumnya.

Hasil Coding Media Monitoring

Media monitoring dilakukan terhadap korpus pemberitaan online yang memuat isu IWIP, Sungai Sagea, dugaan pencemaran, krisis air bersih, ISPA, konflik lahan, CSR/ESG, respons organisasi, serta hasil uji DLH Maluku Utara. Coding dilakukan berdasarkan tujuh kategori: media/sumber, tanggal, isu utama, framing berita, nada berita, respons IWIP, dan kategori SCCT.

Tabel 1. Hasil Coding Media Monitoring Krisis IWIP

No	Media/Sumber	Tanggal	Isu Utama	Framing Berita	Nada	Respons IWIP	Kategori SCCT
1	Mongabay	17 Juli 2022	Pencemaran sungai dan kualitas air	Industri nikel sebagai tekanan terhadap sungai	Negatif	Tidak tampak respons langsung	Silence
2	Mongabay	29 Juli 2022	Konflik lahan dan ruang hidup	Lahan warga sebagai korban ekspansi industri	Negatif	Tidak tampak respons langsung	Silence
3	Mongabay	28 Agustus 2022	Perempuan adat, air, ekonomi rumah tangga	Dampak industri melalui kelompok rentan	Negatif	Tidak tampak respons langsung	Silence
4	Antara Maluku	12 Juli 2023	Gugatan tanah warga	Konflik lahan masuk jalur hukum	Negatif-netral	Tidak tampak respons langsung	Silence
5	Tribun Ternate	27 September 2023	Hasil uji DLH Malut Sungai Sagea	Data teknis pemerintah sebagai pembandingan	Netral-mitigatif	Tidak langsung dari IWIP	Technical clarification
6	Antara/InfoPublik	9 November 2023	Respons IWIP atas Sungai Sagea	Klarifikasi organisasi	Netral-mitigatif	IWIP memberi respons resmi	Denial/Diminish
7	DetikSulsel	10 November 2023	IWIP bantah Sungai Sagea tercemar	Bantahan terhadap atribusi tanggung jawab	Netral-mitigatif	IWIP membantah pencemaran dari tambang	Denial
8	DetikSulsel	6 Desember 2023	Warga takut konsumsi air	Krisis air bersih dan ketakutan warga	Negatif	Bantahan sebelumnya belum menutup	Trust gap

			Sungai Sagea			kekhawatiran	
9	Cermat	13 Desember 2023	Peningkatan ISPA	Industri tambang dikaitkan dengan risiko kesehatan	Negatif	Tidak tampak respons langsung	Silence
10	Kompas/Media Indonesia/Tempo	Jan-Feb 2024	CSR pendidikan, kesehatan, lingkungan	IWIP sebagai perusahaan peduli	Positif	Publikasi CSR	Bolstering
11	Antara/Kompas	Juni 2024	Penanaman mangrove	Konservasi sebagai komitmen lingkungan	Positif	Program mangrove	Bolstering/Corrective action
12	DetikSulsel	19 Juli 2024	Sagea diduga kembali tercemar hingga laut	Krisis berulang dan meluas	Negatif	Tidak tampak respons baru	Crisis recurrence
13	Bloomberg Technoz	25 Juli 2024	JATAM: sungai tercemar dan ISPA	Kritik NGO masuk media ekonomi nasional	Negatif	Tidak tampak respons langsung	Reputational threat
14	DetikSulsel	3 Agustus 2024	Warga cegah utusan IWIP sosialisasi AMDAL	Kegagalan komunikasi partisipatif	Negatif	Sosialisasi AMDAL ditolak warga	Stakeholder engagement failure
15	Mongabay/Cermat/Koridor Indonesia	2024	ISPA, Teluk Weda, krisis ekologis	Dampak lingkungan dan kesehatan publik	Negatif	Tidak tampak respons langsung	Silence
16	IWIP Official	2024/2025	Laporan ESG IWIP	Tata kelola dan keberlanjutan	Positif	Publikasi ESG Report	Bolstering/Legitimacy repair
17	Mongabay	10 Februari 2025	Ruang hidup Orang Sawai hilang	Krisis ruang hidup masyarakat lokal	Negatif	Ada respons terbatas	Limited response
18	Independen.id/JATAM	Februari 2025	Warga minta status PSN IWIP dicabut	Krisis legitimasi dan penolakan publik	Negatif	Tidak tampak respons langsung	Legitimacy crisis

19	Nexus3 Foundation	Mei 2025	Dampak industri nikel Teluk Weda	Risiko lingkungan dan hak hidup sehat	Negatif-kritis	Memicu klarifikasi DLH	Third-party contestation
20	Antara	6 Mei 2026	IWIP dan WBN hadirkan akses air bersih	Program air bersih sebagai jawaban kebutuhan warga	Positif - mitigatif	Penyediaan akses air bersih	Corrective action/Bolstering

Hasil coding menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai IWIP didominasi oleh lima isu utama, yaitu Sungai Sagea dan pencemaran air, krisis air bersih, ISPA dan risiko kesehatan, konflik lahan/ruang hidup, serta CSR/ESG sebagai respons reputasi perusahaan. Dari sisi nada pemberitaan, media lingkungan dan media lokal cenderung membingkai IWIP secara negatif, terutama ketika mengangkat pengalaman warga, konflik lahan, krisis air bersih, ISPA, atau kritik NGO. Sebaliknya, berita yang berasal dari kanal korporasi, advertorial, atau dokumen resmi perusahaan cenderung membingkai IWIP secara positif melalui narasi CSR, ESG, konservasi mangrove, pembangunan infrastruktur, dan program air bersih.

Strategi Komunikasi Krisis PT IWIP

Berdasarkan hasil coding, strategi komunikasi IWIP dapat dipetakan dalam empat pola utama. Pertama, strategi denial. Strategi ini terlihat pada bantahan IWIP terhadap tuduhan bahwa Sungai Sagea tercemar akibat aktivitas tambang. Dalam perspektif SCCT, denial digunakan untuk menolak atribusi tanggung jawab organisasi terhadap krisis (Coombs, 2007). Strategi ini dapat efektif apabila organisasi memiliki data kuat dan dipercaya publik. Strategi ini berisiko memperlebar jarak antara organisasi dan publik apabila warga tetap mengalami kekhawatiran atas air, debu, kesehatan, atau ruang hidup.

Kedua, strategi diminish. Strategi ini tampak ketika organisasi atau aktor pendukung menjelaskan bahwa kondisi tertentu dapat disebabkan oleh faktor alam, cuaca, karakteristik wilayah, atau perbedaan standar pengukuran. Strategi ini bertujuan mengurangi persepsi tanggung jawab organisasi terhadap krisis. Dalam konteks komunikasi risiko, strategi ini perlu didukung oleh transparansi data agar tidak dipersepsikan sebagai penghindaran tanggung jawab.

Ketiga, strategi bolstering. Strategi ini terlihat melalui publikasi CSR dan ESG. Berita mengenai CSR pendidikan, kesehatan, lingkungan, penanaman mangrove, tanggung jawab

sosial, dan laporan ESG dapat dibaca sebagai upaya memperkuat citra positif perusahaan. Dalam perspektif Legitimacy Theory, strategi ini menjadi upaya organisasi mempertahankan penerimaan sosial melalui pengungkapan sosial dan lingkungan (Deegan, 2002; Suchman, 1995).

Keempat, strategi corrective action. Strategi ini tampak dalam program air bersih, konservasi mangrove, dan infrastruktur sosial. Program ini dapat dibaca sebagai tindakan korektif apabila benar-benar menjawab kebutuhan warga dan dapat diverifikasi. Dalam perspektif Image Repair Theory, corrective action menjadi salah satu strategi penting untuk menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya membantah, tetapi juga melakukan perbaikan (Benoit, 1997).

Kontestasi Data antara Nexus3, DLH, Media, dan Perusahaan

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kontestasi data. Kontestasi ini terlihat dari perbedaan antara temuan riset/NGO, pemberitaan media, hasil uji pemerintah, dan klarifikasi DLH Halmahera Tengah.

Laporan Nexus3 menyebutkan bahwa pengumpulan data primer dilakukan melalui pengujian dan analisis sampel lingkungan dan biologi, mencakup sedimen, air, ikan, dan darah penduduk sekitar Weda Bay. Laporan tersebut juga menyampaikan temuan terkait kualitas air, kandungan logam berat pada ikan, serta biomonitoring manusia (Nexus3 Foundation, 2025).

Di sisi lain, DLH Halmahera Tengah memberikan klarifikasi bahwa temuan Nexus3 perlu dibaca secara hati-hati. Pada isu kualitas air Sungai Sagea, DLH menilai bahwa perbedaan hasil dapat dipengaruhi oleh metodologi, parameter pengujian, standar baku mutu, waktu pengambilan sampel, serta objek penelitian. Pada isu ikan, DLH menyatakan bahwa kandungan tertentu ditemukan pada hati ikan, bukan pada daging, sehingga daging ikan masih dinilai layak dikonsumsi. Pada isu arsen dan merkuri dalam tubuh warga, DLH menekankan perlunya kontrol responden, penelusuran asal ikan, pola konsumsi, dan kemungkinan sumber paparan lain sebelum menyimpulkan hubungan langsung dengan aktivitas tambang.

Kontestasi data ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan hanya persoalan fakta ilmiah, tetapi juga persoalan otoritas data. Ketika satu aktor menyampaikan temuan pencemaran, aktor lain dapat menolak atau mengoreksinya berdasarkan standar dan metode berbeda. Dalam situasi seperti ini, publik sering kali tidak hanya bertanya “data siapa yang benar?”, tetapi juga “siapa yang dapat dipercaya?”

Krisis IWIP sebagai Krisis Reputasi Ekologis

Berdasarkan hasil coding, krisis IWIP dapat dipahami sebagai krisis reputasi ekologis, yaitu krisis yang muncul ketika isu lingkungan, kesehatan, dan konflik sosial membentuk tekanan terhadap reputasi organisasi. Dalam kasus ini, reputasi IWIP tidak hanya dipengaruhi oleh satu isu, tetapi oleh akumulasi pemberitaan tentang sungai, air bersih, ISPA, lahan, ruang hidup, dan resistensi warga.

Dalam perspektif SARF, krisis IWIP mengalami amplifikasi sosial karena isu lingkungan diberitakan berulang oleh media, diperkuat laporan NGO, dan dikaitkan dengan pengalaman warga. Oleh karena itu, komunikasi krisis yang efektif tidak dapat hanya berbasis klarifikasi teknis, tetapi harus membangun ruang dialog, membuka data lingkungan, melibatkan warga terdampak, dan menghadirkan audit independen.

Strategi bolstering melalui CSR, ESG, dan program lingkungan memiliki fungsi penting dalam membangun citra positif. Strategi ini juga memiliki risiko reputasi apabila publik menilai CSR dan ESG tidak menjawab persoalan utama yang diberitakan. Dalam konteks ini, CSR dan ESG tidak cukup diposisikan sebagai publikasi keberhasilan organisasi, tetapi perlu dikaitkan secara langsung dengan keluhan warga, hasil pemantauan lingkungan, dan penyelesaian masalah yang dapat diverifikasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis IWIP di Halmahera Tengah merupakan krisis sosial-ekologis yang berkembang menjadi krisis reputasi dan kepercayaan publik. Isu yang muncul tidak hanya berkaitan dengan dugaan pencemaran Sungai Sagea, tetapi juga krisis air bersih, ISPA, konflik lahan, perubahan ruang hidup, resistensi warga, serta kritik terhadap narasi CSR dan ESG perusahaan. Strategi komunikasi krisis IWIP dalam pemberitaan dapat dibaca melalui pola denial, diminish, bolstering, dan corrective action. Bantahan terhadap tuduhan pencemaran menunjukkan strategi denial. Penjelasan mengenai faktor alam atau perbedaan penyebab menunjukkan strategi diminish. Publikasi CSR, ESG, dan program lingkungan menunjukkan bolstering. Program air bersih dan infrastruktur sosial dapat dibaca sebagai corrective action.

Efektivitas komunikasi krisis masih terbatas karena krisis berlangsung dalam ruang kontestasi data. Temuan Nexus3, pemberitaan media, kritik NGO, klarifikasi DLH, dan respons perusahaan membentuk pertarungan narasi yang memengaruhi persepsi publik.

Klarifikasi DLH Halmahera Tengah menunjukkan bahwa perbedaan metodologi, standar baku mutu, waktu pengambilan sampel, objek penelitian, dan sumber paparan perlu diperhatikan sebelum menarik kesimpulan pencemaran. Di sisi lain, komunikasi risiko tidak cukup hanya berbasis data teknis, tetapi juga perlu menjawab kecemasan warga, pengalaman komunitas, dan kebutuhan informasi yang transparan.

Dengan demikian, komunikasi krisis dalam industri ekstraktif memerlukan pendekatan yang lebih terbuka, empatik, partisipatif, dan berbasis bukti. Perusahaan dan pemerintah perlu membangun mekanisme komunikasi risiko yang tidak hanya bersifat klarifikasi, tetapi juga melibatkan warga dalam pemantauan, membuka data lingkungan secara berkala, menghadirkan audit independen, dan mengelola isu melalui media monitoring berkelanjutan.

Secara akademik, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model komunikasi krisis lingkungan yang menggabungkan SCCT, komunikasi risiko, framing media, SARF, stakeholder salience, legitimacy theory, dan media monitoring berbasis AI. Model ini dapat digunakan untuk membaca bagaimana isu lingkungan berkembang dari keluhan warga menjadi krisis reputasi organisasi.

Bagi perusahaan, penelitian ini merekomendasikan penguatan transparansi data lingkungan, penyediaan kanal pengaduan yang responsif, publikasi hasil pemantauan kualitas air dan udara secara berkala, serta komunikasi yang lebih empatik terhadap warga terdampak. CSR dan ESG sebaiknya tidak hanya dipublikasikan sebagai capaian korporasi, tetapi dikaitkan langsung dengan keluhan dan kebutuhan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, hasil uji laboratorium perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk standar baku mutu yang digunakan, lokasi pengambilan sampel, waktu pengujian, parameter, serta keterbatasan hasil. Hal ini penting agar data teknis tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, L., Liu, B. F., & Jin, Y. (2012). How audiences seek out crisis information: Exploring the social-mediated crisis communication model. *Journal of Applied Communication Research*, 40(2), 188–207. <https://doi.org/10.1080/00909882.2012.654498>
- Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. *Public Relations Review*, 23(2), 177–186. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(97\)90023-0](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(97)90023-0)

- Bidul, S., & Widowaty, Y. (2023). Analisis yuridis dampak pencemaran lingkungan pertambangan mangan dan nikel di Provinsi Maluku Utara. *JUSTISI*, 9(3), 412–426. <https://doi.org/10.33506/js.v9i3.2768>
- Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of Situational Crisis Communication Theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163–176. <https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049>
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures: A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Haya, A., Alkatiri, H., & Halil, A. (2022). Kajian perubahan kualitas air di kawasan lingkaran tambang Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal GEOMining*, 3(2), 84–91.
- Imran, M., Castillo, C., Diaz, F., & Vieweg, S. (2015). Processing social media messages in mass emergency: A survey. *ACM Computing Surveys*, 47(4), Article 67. <https://doi.org/10.1145/2771588>
- Indonesia Weda Bay Industrial Park. (2024). Environmental, social and governance report 2024. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park.
- Jaringan Advokasi Tambang. (2024). IWIP sebagai etalase kejahatan strategis nasional negara-korporasi: Penaklukan dan perampokan Halmahera. JATAM.
- Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R., Kasperson, J. X., & Ratick, S. (1988). The social amplification of risk: A conceptual framework. *Risk Analysis*, 8(2), 177–187. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1988.tb01168.x>
- Maulida, R. A. (2021). Implementasi Teori Komunikasi Krisis Situasional pada kasus Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui @pikobar_jabar. *Jurnal Pekommas*, 6(1), 83–93. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2021.2060109>
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022105>

- Nexus3 Foundation. (2025). Dampak lanjutan dari aktivitas industri nikel di Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Indonesia. Nexus3 Foundation.
- Reynolds, B., & Seeger, M. W. (2005). Crisis and emergency risk communication as an integrative model. *Journal of Health Communication*, 10(1), 43–55. <https://doi.org/10.1080/10810730590904571>
- Saputra, A. R., Faliana, C., Durahman, M. A., & Ginting, P. (2023). Dilema Halmahera di tengah industri nikel. *Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat*.
- Solihin, O. (2021). Implementasi big data pada sosial media sebagai strategi komunikasi krisis pemerintah. *Jurnal Common*, 5(1), 56–66. <https://doi.org/10.34010/common.v5i1.5123>
- Stieglitz, S., Mirbabaie, M., Ross, B., & Neuberger, C. (2018). Social media analytics: Challenges in topic discovery, data collection, and data preparation. *International Journal of Information Management*, 39, 156–168. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.002>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>